

PERMASALAHAN URBANISASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh:

Sri Najmi Aprilia (2008204086)
Fitriyani Tiarawati (2008204088)

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Dalam beberapa Kerpustakaan kependudukan dijelaskan bahwa sebenarnya urbanisasi muncul terkait dengan terjadinya proses perubahan dan pertumbuhan suatu wilayah yang disebut dengan istilah kota. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi pustaka. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Urbanisasi merupakan suatu proses penambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau proses transformasi suatu wilayah berkarakter rural menjadi urban. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: Pembangunan, Urbanisasi

ABSTRACT

The main problem in regional development lies in the emphasis on development policies based on the peculiarities of the region concerned (endogenous development) by using the potential of human resources, institutions, and physical resources locally (regional). In some population literature it is explained that in fact urbanization appears related to the process of change and growth of an area called the city. This research method is to use a qualitative method with the type of research that is literature study. Regional economic development is a process in which local governments and their communities manage resources. -existing resources and forming a pattern of partnership between local governments and the private sector to create new jobs and stimulate the development of economic activity (economic growth) in the area. Urbanization is a process of population growth in an urban area

or the process of transforming an area with a rural character The main problem in regional development lies in the emphasis on development policies that are based on the peculiarities of the region concerned (endogenous development) by using the potential of human resources, institutions, and physical resources locally (regionally). This orientation directs us to take initiatives originating from the region in the development process to create new job opportunities and stimulate increased economic activity.

Keywords: Development, Urbanization

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari global goals Melenium Development Goals (MDGs) yang akan berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali pada United Nations Conference on Sustainable Development yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai tahun 2030. SDGs tidak hanya berlaku untuk negara berkembang, tapi juga untuk negara-negara maju pada akhir tahun 2015 (Aziz, et al, 2023).

Indonesia sebagai negara berkembang pun tidak luput dari permasalahan ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2010 lebih dari separuh penduduk Indonesia atau sebanyak 54,2% tinggal di perkotaan. Sementara pada 2025, jumlah penduduk diprediksi naik signifikan dimana 68 % dari populasi di Indonesia akan tinggal di kota (Jegho 2016). Proporsi penduduk perkotaan Indonesia telah melampaui rata-rata proporsi penduduk perkotaan di kawasan Asia. Proporsi penduduk perkotaan di Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang umumnya berkisar diantara 35–40% (BPS 2017). Selain itu, tren pertumbuhan kota-kota kecil juga menunjukkan bahwa kota-kota kecil di Indonesia juga tumbuh dengan begitu cepat (Tim UGM 2015). Hal ini merupakan peringatan bagi kota-kota di Indonesia untuk mengantisipasi tantangan dan permasalahan akibat bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan, seperti menurunnya luas lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik (Aziz & Nur'aisah, 2021).

Sebagai salah satu fenomena sosial, urbanisasi merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara terutama pada kota yang proses pertumbuhannya yang amat cepat (Aziz, 2021). Apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan semakin meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat maka tidak mengherankan apabila penduduk pun akan melakukan migrasi dalam arti berpindahnya penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melintasi batas wilayah tertentu sementara itu, indikator suatu kota pun ternyata seringkali berbeda antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada makalah ini akan membahas tentang: Apa yang dimaksud dengan pembangunan dan urbanisasi? Fase, evolusi dan paradigma apa saja dalam pembangunan ? apa saja dampak dari urbanisasi ? Hal ini

bertujuan untuk mengetahui tentang pembangunan dan urbanisasi dalam pandangan beberapa teori, pemerintah dan perspektif islam maupun dari para ahli.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Bakhri, et al, 2023).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Bakhri, et al, 2021).

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja baru bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (Dharmayanti & Aziz, 2024). Teori-teori ekonomi pembangunan konvensional mulai dari Adam Smith, David Ricardo maupun Scumpeter meyakini bahwa penduduk, modal (kapitalisme) dan kewirausahaan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dalam kajian ekonomi Islam, semua factor tersebut juga dianggap penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip tauhid dan mengedepankan maqasid syariah (Fatmasari, et al, 2022). Prinsip ini bukan hanya akan memperluas teori-teori pembangunan, namun juga akan memunculkan teori baru ekonomi pembangunan yang lebih berkeadilan. Dalam Islam, pembangunan ekonomi (tanmiah al-iqtishadiyah) lazimnya dihubungkan dengan konsep 'imarah al-ard (memakmurkan bumi) yang dipahami dari QS Hud 61, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya agama (hifz ad-din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (mal) yang biasa disebut dengan maqasid syari'ah. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan negara yang mampu mweujudkan stabilitas pembangunan ekonomi material, stabilitas keamanan, dan stabilitas pembangunan spiritual. Dengan demikian, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah baldatun thayyibatun wa rabb ghafur sebuah negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah.

B. FASE EKONOMI PEMBANGUNAN

Pradigma ekonomi konvensional terdiri dari tiga fase yaitu, Fase Klasik, Fase Keynesian, dan Fase Neo Klasik.

1. Fase Klasik

Pada masa fase klasik ini dikembangkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Jhon Stuart Mill dan Maltus. Adam Smith memiliki karya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Nation* yang dipublikasikan pada tahun 1776, yaitu menyerahkan aturan dan penguasaan ekonomi kepada masyarakat didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran, sedangkan pemerintah tidak bercampur tangan. Teori ini dikenal sebagai sistem ekonomi liberal dan dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika dan beberapa negara di Eropa.

2. Fase Keynesian

Pada tahun 1929-1932 di Amerika terjadi Great Depression (Depresi Ekonomi) lalu muncullah aliran ini. Menurut Keynes dengan bukunya yang berjudul *The General Theory Of Employment, Interest and Money* yang diterbitkan pada tahun 1936, depresi ekonomi disebabkan karena kesalahan sistem ekonomi *laissez faire*. Keynes mengusulkan untuk meninggalkan ideologi *laissez faire* dan pemerintah harus ikutserta bercampur tangan dalam mengendalikan dan mempengaruhi perekonomian, sementara itu pengusaha swasta diberi kepercayaan dalam kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi. Teori Keynes pun banyak dipergunakan oleh negara-negara yang baru merdeka untuk membangun perekonomian negaranya.

3. Fase Neo Klasik

Fase ini dimulai pada tahun 1970-an pada fase ini, ideologi Keynes dan sosialisme mulai melemah dan ekonomi cenderung anti kekuasaan (negara) dan kembali kepasar bebas.

Pada ketiga fase ini, menunjukkan adanya perubahan dalam penerapan kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang. Negara berkembang yang mengikuti model negara barat mengalami kebingungan karena pertentangan-pertentangan konsep dari Neo Klasik dan Keynes serta sosialis. Sehingga membuat tugas negara berkembang sangat rumit, tidak hanya mengembangkan ekonomi dengan cara yang tepat, efisiensi dan berkeadilan, tetapi harus mengubah keseimbangan pembangunan yang ditimbulkan oleh teori dan kebijakan yang tidak cocok untuk negara berkembang.

C. PARADIGMA PEMBANGUNAN

Paradigma pembangunan di negara-negara berkembang adalah :

1. Paradigma Modernisasi

Setelah perang dunia kedua muncullah paradigma ini dimana pasar dalam negeri Amerika terancam kehilangan mitra dagang. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1946/1947 pemerintah Amerika Serikat

membuat kebijakan ekonomi Marshall Plan yang bertujuan untuk membantu dan memperbaiki perekonomian negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa pasca perang serta membentuk dua lembaga keuangan yang bertugas membantu negara-negara Eropa dan negara berkembang, yaitu World Bank dan International Monetary Funds (IMF). Keberhasilan pembangunan di negara-negara Eropa kemudian ditrasfer ke negara-negara dunia ketiga.

2. Paradigma Ketergantungan (Dependensi)

Menurut paradigma dependensi sentuhan modernisasi merupakan penyebab negara-negara berkembang mengalami keterbelakangan, dan kemajuan dari negara-negara maju menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (*the development of underdevelopment*). Secara filosofis, teori dependensi melihat bahwa pembangunan bukan hanya proses industrialisasi, peningkatan output dan produktivitas, namun juga peningkatan standar hidup bagi setiap penduduk di negara dunia ketiga.

3. Paradigma Sistem Dunia

Paradigma sistem dunia muncul sebagai kritik atas paradigma modernisasi dan dependensi. Pencetus teori ini adalah Immanuel Wallerstein (1974) memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia, dan integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pada kepentingan politik. Menurut Wallerstein sistem dunia kapitalis dibagi kedalam tiga jenis, yaitu negara core (pusat), semiperiferi (setengah pinggiran), dan negara periferi (pinggiran). Perbedaan ketiga jenis negara ini ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Menurut teori ini, negaranegara di dunia bisa naik dan turun kelas. Negara pusat bisa saja menjadi negara semi pinggiran, negara semi pinggiran bisa menjadi negara pusat atau negara pinggiran, dan negara pinggiran bisa menjadi negara semi pinggiran. Hal ini terbukti pada perang Dunia II, Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi negara pusat turun kelas digantikan Amerika Serikat pasca kehancuran dahsyat di Eropa.

D. EVOLUSI PARADIGMA PEMBANGUNAN

1. Pandangan Tradisional Tentang Pembangunan

Pandangan tradisional melihat bahwa pembentukan modal merupakan syarat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan modal asing dan melakukan industrialisasi.

2. Paradigma Baru Dalam Pembangunan

Beberapa paradigma baru dalam pembangunan kemudian berkembang, seperti paradigma pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs) pembangunan mandiri (*self reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*eco development*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan

pendapatan menuntut etnis (ethno development). Berikut beberapa paradigma baru yang muncul setelah tahun 1960 :

- a. Strategi pertumbuhan dengan distribusi
- b. Strategi kebutuhan pokok
- c. Paradigma pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Paradigma*)
- d. Strategi pembangunan berkelanjutan
- e. Strategi berdimensi etnik
- f. Paradigma partisipasi masyarakat dalam pembangunan (*General Public Participation Paradigma*)
- g. Paradigma Syari'ah (syari'ah paradigma)

3. Paradigma Islam Tentang Pembangunan

- a. Paradigma pembangunan menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, untuk menciptakan kesejahteraan, maka setiap negara harus melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membuat sebuah lingkaran yang disebut M. Umer Chapra dengan daur keadilan atau *cycle of equity*. Komponen-komponen tersebut adalah kekuatan penguasa (*al-mulk*), syari'ah (*hukum*), rakyat (*ar-rijal*), kekayaan (*al-mal*), pembangunan (*al-imarah*), dan keadilan (*al-'adl*). Semua variable tersebut bekerja dalam sebuah lingkaran yang dinamis saling tergantung dan saling mempengaruhi dan menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu peradaban/negara.

Keunikan konsep Ibnu Khaldun ini adalah hubungan antar variable yang saling terkait satu sama lain sehingga satu variable bisa menjadi pemicu sedangkan variable yang lain dapat bereaksi ataupun tidak dalam arah yang sama. Pembangunan merupakan unsur penting dalam masyarakat, tanpa pembangunan masyarakat tidak akan maju dan berkembang. Namun, perkembangan tidak akan berarti tanpa keadilan (Fatmawati, et al, 2022).

- b. Paradigma pembangunan menurut Khursid Ahmad

Menurut Khursid Ahmad filosofis pembangunan ekonomi terdiri dari tauhid, keadilan, khilafah dan tazkiyah. Konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan manusia dengan semesta di muka bumi. Tazkiyah juga mendorong pembangunan tidak hanya pada hal-hal yang bersifat fisik, material, melainkan jugak aspek moral spiritual. Ukuran keberhasilan juga kualitas moral pelaku pembangunan.

- c. Paradigma pembangunan menurut Umar Chapra

Dengan menggunakan konsep *Islamic worldview* yang didasarkan pada tiga konsep fundamental yaitu tauhid (keesaan Allah SWT), khilafah, dan keadilan ('adalah). Adapaun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allaah, juga sekaligus khalifatullah fii ardh bertugas untuk memakmurkan bumi. Tugas manusia adalah beribadah dan memakmurkan bumi dan diberi bekal pengetahuan dan

aturan- aturannya. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan.

Pembangunan dalam islam juga harus mengacu pada tujuan syari'at (*maqashid syari'ah*) yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posteirity*) dan kekayaan (*wealth*) sehingga tercapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (property). Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan tindakan kebijakan sebagai solusi bagi pembangunan yang disertai keadilan dan stabilitas yaitu :

- a. Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia
- b. Mengurangi konsentrasi kekayaan
- c. Melakukan rekonstrukturisasi ekonomi
- d. Melakukan restrukturisasi keuangan
- e. Perencanaan kebijakan strategis

E. PENGERTIAN URBANISASI

Dalam beberapa Kerpustakaan kependudukan dijelaskan bahwa sebenarnya urbanisasi muncul terkait dengan terjadinya proses perubahan dan pertumbuhan suatu wilayah yang disebut dengan istilah kota (Haerisma, et al, 2023). Oleh karna itu tidak mengherankan apabila urbanisasi ini dapat diartikan sebagai suatu proses perpindahan penduduk dari desa kekota walaupun secara harfiah urbanisasi bisa juga berarti pengkotaan.

Urbanisasi merupakan suatu proses penambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau proses transformasi suatu wilayah berkarakter rural menjadi urban, yang terjadi karena adanya faktor pendorong dan penarik (*Push en pull factoren*), yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan. Menurut R. Bintarto (1984) melihat urbanisasi dari sisi beberapa perspektif umpamanya: Pertama, dari segi demografi yang mana urbanisasi ini dilihat sebagai suatu proses yang ditunjukkan melalui perubahan dalam jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Maksudnya proses urbanisasi tersebut lebih ditekankan pada aspek kependudukan dalam arti terjadi ledakan penduduk yang terjadi baik itu di kawasan pedesaan maupun perkotaan dinilai cenderung melampaui daya dukung wilayah tersebut. Tak hanya itu dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk tentu saja akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi perlunya tersedia fasilitas perumahan. Kedua, dari sisi ekonomi (Harjadi, et al, 2021). Dalam hal ini urbanisasi dapat dianggap sebagai suatu proses perubahan struktur dalam bidang ekonomi yang bisa diamati pada munculnya perubahan pada pekerjaan masyarakat desa yaitu dari sektor pertanian yang kemudian beralih bekerja menjadi buruh atau pekerja yang sifatnya nonagraris dikota. Ketiga, dari perspektif perilaku yang mana hal ini lebih terfokus pada proses penyesuaian manusia terhadap situasi yang mengalami perubahan baik yang disebabkan karena perkembangan teknologi maupun

akibat yang ditimbulkan dari munculnya perkembangan baru dalam kehidupan manusia. Keempat, dari aspek sosiologinya yang dalam hal ini urbanisasi dihubungkan dengan adanya perubahan gaya hidup warga desa sebagai dampak dari adanya pengaruh masyarakat perkotaan. Dan kelima dari perspektif geografi. Dalam hal ini urbanisasi dipandang sebagai proses terjadinya distribusi, difusi perubahan dan pola menurut waktu dan tempat. Adapun menurut pendapat yang dikemukakan P.J.M.Nas (1979) bahwa urbanisasi adalah proses yang digerakkan oleh perubahan struktural dalam masyarakat sehingga daerah yang dulu merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencarian yang agraris lambat laun atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota.

Urbanisasi menjadi fenomena yang kuat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Baiquni, 2004) Kota besar dan pusat-pusat industri menjadi tujuan kaum muda untuk mencari pekerjaan. Fenomena ini berkaitan dengan daya tarik pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lapangan pekerjaan yang terbuka dengan dibangunnya industri dan jasa di perkotaan (Harjadi, et al, 2023). Faktor daya tarik kota lainnya adalah tersedianya sarana pendidikan yang lebih tinggi, kehidupan modern yang menyenangkan dan beragamnya fasilitas hiburan. Kehidupan kota menimbulkan mimpi tentang kemajuan dan kesejahteraan bagi kalangan muda untuk mengadu nasib. Faktor daya dorong urbanisasi berkaitan dengan involusi pertanian di pedesaan Jawa dan perubahan pada sektor pertanian akibat modernisasi. Lapangan kerja di pedesaan mulai menyempit dan pekerjaan ini tidak lagi menarik bagi kaum muda. Seperti telah dijelaskan pada awal tulisan ini bahwa persoalan urbanisasi tidak hanya menjadi persoalan demografis tetapi lebih luas daripada itu. Capital brain dan brain drain adalah sebuah fenomena yang harus diwaspadai. Jika hal ini dibiarkan maka desa akan mengalami pengurasan sumber daya (Layaman, et al, 2021).

F. DAMPAK URBANISASI

Proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota akan diikuti adanya pengembangan fisik kota termasuk berbagai dampak positif maupun negatif. Urbanisasi dan pengembangan kota adalah suatu proses wajar dan tidak mungkin dihindari sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dampak urbanisasi di negara maju berbeda apabila dibandingkan dengan negara berkembang (Jaelani, et al, 2021). Perbedaan tersebut adalah, di negara berkembang secara fisik, kota akan tumbuh menjadi besar dan luas dengan tingkat teknologi dan kualitas kehidupan kota yang kurang memadai, misalnya permukiman miskin (squatter), sarana-prasarana yang kurang memadai. Sebaliknya di negara maju, perubahan fisik kota berkembang dengan permukiman elite di pinggira kota yang ditunjang dengan teknologi maju. Di beberapa negara sedang berkembang di Asia Tenggara, terdapat korelasi antara perkembangan ekonomi dan tingkat urbanisasi (Suharso, 2014).

1. Aspek fisik

- a. Timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh tanpa fasilitas yang memadai sebagai tempat tinggal para urbanisasi
 - b. Menurunnya estetika dan kualitas lingkungan seperti timbulnya berbagai jenis;
2. Aspek ekonomi:
 - a. Timbulnya berbagai kegiatan ekonomi sektor informal;
 - b. Timbulnya pengangguran;
 - c. Timbulnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin;
 3. Aspek sosial dan budaya:
 - a. Timbulnya bentrokan budaya antar ras, suku dan agama;
 - b. Timbulnya perbuatan pelanggaran hukum khususnya hukum pidana seperti kriminalitas dan sebagainya. Di lain pihak di perdesaan atau di kota-kota kecil daerah asal urbanisasi kekurangan tenaga produktif untuk pengembangan daerah maupun pelayanan jasa lainnya yang semakin berkembang.

G. DAMPAK URBANISASI TERHADAP PEMUKIMAN KUMUH (SLUM AREA)

Fenomena yang sering terjadi dalam perkembangan di kota-kota besar yaitu terjadinya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat yang biasanya tidak disertai dengan antisipasi daya dukung dengan baik. Tingginya pertumbuhan penduduk di kota biasanya terjadi karena dua hal, yang pertama terjadi pertumbuhan penduduk secara alami dan kedua terjadi karena adanya arus urbanisasi akibat tingginya jumlah migrasi (Nasir, et al, 2022). Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tentunya berdampak pada lingkungan sekitar, terutama mengenai permukiman yaitu timbulnya permukiman kumuh daerah slum (slum area) terutama pada lahan-lahan kosong di perkotaan. timbulnya permukiman kumuh daerah slum (slum area) secara tidak langsung disebabkan oleh arus urbanisasi dari desa kota yang membuat pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan. Terdapat faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh, yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana prasarana, faktor sosial ekonomi, faktor tata ruang dan faktor lahan perkotaan (Wadud & Layaman, 2023).

Urbanisasi mendorong aktivitas antar penduduk untuk saling berinteraksi secara global. Namun, tingkat urbanisasi yang tidak di dukung dengan perencanaan perkotaan atau manajemen perkotaan yang baik akan menimbulkan masalah baru. Hal ini menjadi tantangan bagi perencanaan wilayah perkotaan. Salah satu tantangan yang serius adalah tantangan lingkungan. Masalah urbanisasi adalah merupakan bagian dari proses pengkotaan. Kota-kota tumbuh dan berkembang bahkan menjadi kota metropolis disebabkan karena adanya gejalaurbanisasi. Ada berbagai keuntungan yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan kota dari akibat

urbanisasi itu sendiri. Kota telah menyediakan tenaga-tenaga murah, kota dapat mempertahankan volume penduduk. Sedemikian urbanisasi telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tertentu. Urbanisasi bukan hanya dianggap sebagai faktor yang dapat menciptakan berbagai masalah, melainkan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota. Daya pengaruh urbanisasi semakin kuat oleh faktor semakin beragam dan luasnya ketersediaan lapangan kerja kota (Wartoyo & Haerisma, 2022).

Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan timbulnya pemukiman liar yang cenderung kumuh dan berlokasi di pusat perkotaan. Hal ini berdampak pada kondisi kota yang semraut, tidak tertata, serta terdegradasi kapasitas fungsinya dalam mewujudkan pengembangan masyarakat. Pemukiman illegal-illegal. Ini telah mendorong suatu bentuk besar migrasi yang disebabkan oleh kemiskinan dari daerah pedesaan yang mandek dari desa ke kota. Permukiman-permukiman kumuh ini membutuhkan layanan dasar minimum seperti air pasokan, saluran ilmiah, listrik, perumahan, sanitasi higienis, dll. Untuk memfasilitasi peningkatan lingkungan situasi kota secara keseluruhan. Pertambahan penduduk yang pesat ini mengakibatkan terjadinya sejumlah permasalahan di daerah perkotaan, salah satu diantaranya adalah munculnya pemukiman. Penghuni pemukiman kumuh (daerah slum) adalah sekelompok orang yang datang dari desa menuju kota dengan tujuan ingin mengubah nasib. Mereka tidak memiliki keahlian dan jenjang pendidikan yang cukup untuk bekerja di sektor industri di daerah perkotaan, sehingga akhirnya memasuki sektor informal. Akibatnya mereka berada dalam kehidupan ekonomi yang miskin karena hanya memiliki penghasilan yang rendah tetapi harus berhadapan dengan biaya hidup yang tinggi dikota (Wartoyo, et al, 2022).

Dampak yang terjadi selanjutnya adalah terjadinya pemadatan bangunan (densifikasi) permukiman, yang berakibat menurunnya kualitas permukiman, dengan demikian di daerah perkotaan akan timbul daerah-daerah permukiman yang kurang layak huni yang sangat padat, dan hal ini akan membawa suatu akibat pada kondisi lingkungan permukiman yang buruk, yang selanjutnya disebut sebagai daerah kumuh (slum area). Salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh adalah adanya urbanisasi yang tidak terkendali, proses pengkotaan (urbanisasi) baik secara fisik maupun karena adanya mobilitas penduduk dari luar perkotaan berakibat terhadap adanya krisis perumahan. Keberadaan pemukiman kumuh di seluruh dunia juga merupakan Pemukiman Kumuh adalah elemen penting dari urbanisasi saat ini.

H. DAMPAK URBANISASI BAGI PERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA

Indonesia memasuki era perkotaan, ditandai oleh dominannya proporsi penduduk yang tinggal di kota. Urbanisasi memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan kelayakan hidup orang Indonesia. Namun, urbanisasi juga menciptakan kesenjangan pembangunan antar-wilayah serta munculnya masalah kemiskinan dan kekumuhan (Yusuf, et al, 2021). Di tengah paradoks

urbanisasi ini, kepariwisataan muncul sebagai penggerak utama pembangunan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak kepariwisataan terhadap perubahan pola urbanisasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptifanalitik. Pengumpulan data dan informasi melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran paradigma, strategi pengembangan, dan pola pengelolaan pariwisata di Indonesia mengubah corak urbanisasi dalam dua pola. Pertama, munculnya pola urbanisasi yang mengubah desa menjadi daerah yang memiliki ciri perkotaan karena pengembangan pariwisata perdesaan. Kedua, berkembangnya kotakota kecil, sedang, dan kota-kota (daerah urban) baru karena tren wisata kota. Kedua pola ini menciptakan urbanisasi yang proporsional dan berkontribusi dalam agenda pemerataan pembangunan di Indonesia.

Menurut Tjiptoherijanto (2007), meningkatnya proses urbanisasi tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan meningkatnya urbanisasi di suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan (Yasin, et al, 2023).

Masalah urbanisasi yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan Konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih. Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia.

Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan urban *crime* dan masih banyak masalah lain. Di desa juga akan timbul masalah diantaranya yakni berkurangnya sumber daya manusia karena penduduknya telah pergi ke kota, desa akhirnya tidak mengalami perkembangan yang nyata Kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebih, telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, urbanisasi akan dilihat sebagai faktor penentu bagai sebuah kota dapat berkembang baik secara fisik, maupun secara sosial. Dengan begitu, bentuk atau pengertian dari urbanisasi itu dapat dilihat dengan lebih jelas juga akibat/dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan di kota. Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota yaitu :

1. Secara Fisik

- Lahan terbangun vs lahan hijau/terbuka

Dapat dipastikan hampir seluruh lahan di kota sudah terbangun baik untuk bangunan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri, perkantoran maupun bangunan lain. Intensitas lahan terbangun yang terus meningkat menyebabkan sulit dijumpainya lahan hijau/terbuka yang berfungsi sebagai ruang publik.

- Sebaran fasilitas perkotaan

Disamping sebagai pusat pemerintahan, pusat industri dan perdagangan, pusat aktivitas pelayanan jasa, Jakarta juga sebagai pintu masuk dan keluarnya transportasi internasional yang mobilitasnya cukup tinggi. Karena sifatnya yang demikian, maka muncul berbagai kawasan perdagangan, kawasan rekreasi, serta didukung oleh fasilitas perekonomian.

- Jaringan transportasi dan pola pergerakan ke pusat kota

Jaringan transportasi dan pola pergerakan ke pusat kota dari kawasan suburban atau pinggir kota memicu adanya penyesuaian, perbaikan, dan penambahan jalan dan moda angkutan baru.

- Perkembangan land use

Pembangunan dan pengembangan permukiman atau perumahan secara intensif dan ekstensif yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang berdampak pada perubahan struktur tata ruang perkotaan.

- Permasalahan lingkungan

Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan sebagai akibat dari pembangunan yang tidak terencana serta pengaturan sarana dan prasarana kota yang semrawut menimbulkan permasalahan lingkungan yang semakin parah seperti banjir, tanah longsor, polusi udara, tanah, air dan udara.

- Pemukiman kumuh

Semakin banyak penduduk kota yang tinggal berhimpit-himpit di berbagai pusat pemukiman dan terus bertambahnya para pemukim tetap dengan jumlah dua kali lipat setiap lima hingga sepuluh tahun.

2. Secara Sosial

- Pengangguran dan kemiskinan

Meledaknya jumlah pencari tenaga kerja baik di sektor formal maupun sektor informal diakibatkan oleh tingkat penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan yang ada, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah perkotaan. Terbatasnya pendidikan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki juga menjadi penghalang bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

- Kriminalitas

Tekanan untuk bertahan hidup (*survive*) misalnya, akan mendorong manusia bertindak apapun, termasuk tindakan kriminal. Hal ini pulalah yang menjadi penyebab mengapa angka kriminalitas di kota semakin hari semakin meningkat.

I. FAKTOR URBANISASI

Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi yang meliputi faktor penarik dan pendorong. Faktor penarik merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang tertarik untuk pindah ke kawasan perkotaan karena terdapat daya tarik yang ditawarkan. Faktor pendorong terdiri atas fasilitas kesehatan yang memadai, standar hidup yang tinggi, standar pendidikan yang tinggi, fasilitas rekreasi, kesempatan kerja, keamanan kehidupan dan properti yang lebih baik dan lingkungan sosial yang lebih baik. Sedangkan faktor pendorong merupakan faktor yang menyebabkan seseorang pindah ke kawasan perkotaan karena kondisi perdesaan yang sudah tidak mendukung. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, standar hidup yang rendah, keamanan hidup yang rendah, minim fasilitas transportasi dan komunikasi, kurangnya lapangan pekerjaan, minim fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan yang rendah.

Adapun dua faktor yang mempengaruhi urbanisasi yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud di antaranya adalah berupa Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kota dan Kesempatan Kerja di Samarinda. Dalam faktor ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto sangat berperan penting dalam menunjang keadaan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah seperti yang disebutkan dalam teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry Richardson (1973) yang menyaran bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Begitupun dengan tingginya tingkat upah di kota yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang ingin melakukan urbanisasi atau migrasi dengan tujuan mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada gaji dari daerah asal. Dan kesempatan kerja masih menjadi masalah yang utama bagi pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan ketimpangan antara kesempatan kerjadengan jumlah penduduk yang ada. Dengan pembangunan yang ada belum bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang banyak menyebabkan angka pengangguran meningkat dari tahun ketahun.

Di samping faktor ekonomi, beberapa faktor lain juga berperan sebagai penyebab terjadinya mobilitas penduduk desa ke wilayah perkotaan. Ketersediaan sarana dan fasilitas sosial yang lebih berkualitas dibanding dengan yang terdapat di perdesaan adalah salah satu di antaranya. Contoh, penduduk desa yang kaya akan mengirimkan anak-anaknya ke kota untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Skeldon 1997). Hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000 mendukung pendapat Skeldon tersebut, yaitu proporsi tertinggi (23,75 persen) penduduk usia pendidikan menengah dan tinggi (15 -24 tahun) di perdesaan pindah ke kota karena alasan ingin melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, penduduk usia muda yang pindah ke kota dengan tujuan untuk

menempuh pendidikan yang lebih tinggi menjadi salah satu kelompok penyumbang pertumbuhan penduduk kota.

Banyak faktor-faktor urbanisasi di Indonesia, berikut ini adalah faktor urbanisasi di Indonesia :

1. Proses Alami dan Migrasi, Proses alami meliputi jumlah kelahiran dan kematian di suatu negara. Berdasarkan proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh Bappenas yakni angka kelahiran pada 2035 menunjukkan penurunan, sementara itu tingkat kematian mengalami kenaikan. Migrasi penduduk menyebabkan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk pada suatu wilayah. Bentuk migrasi di Indonesia yang paling nampak yakni urbanisasi. Proporsi jumlah penduduk kota di Indonesia terus mengalami peningkatan.
2. Kondisi Ekonomi, Faktor pendorong penduduk desa melakukan urbanisasi karena minimnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Pertanian menjadi sector utama yang diandalkan oleh penduduk, sementara itu angka kelahirannya semakin meningkat yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan. Kemiskinan di desa menjadi faktor pendorong penduduk desa untuk bermigrasi. Terdapat kaitan antara meningkat dan menurunnya PDB suatu negara dengan tingkat urbanisasi. Bila ditinjau dari perspektif ekonomi, proses urbanisasi mampu meningkatkan produktifitas dan efisiensi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya nasional. Meskipun, di sisi lain urbanisasi dapat menjadi beban fiskal tambahan terkait perbaikan infrastruktur.
3. Fasilitas Sosial-Ekonomi dan Urbanisasi, Fasilitas yang memadai menjadi daya tarik penduduk desa melakukan urbanisasi menuju kawasan perkotaan. Fasilitas pendidikan yang memadai menjadi alasan penduduk melakukan migrasi. Salah satu capaian pembangunan Indonesia yakni meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan kemudahan mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan yang layak, pendapatan, dan layanan kesehatan.
4. Aksesibilitas menuju Fasilitas Dasar, Kemudahan akses menuju pelayanan dasar menjadi daya tarik penduduk untuk melakukan urbanisasi. Ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan listrik menjadi faktor pertimbangan penduduk untuk bermukim.
5. Perkembangan Infrastruktur, Perkembangan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional dalam menggerakkan roda perekonomian. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas publik menjadi bagian utama yang perlu diperhatikan. Terkait kondisi infrastruktur Indonesia yang cenderung kurang memadai, maka perlu dilakukan pembenahan guna mengurangi kesenjangan pendapatan yang berdampak pada PDB per kapita. Perbaikan infrastruktur berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

6. Industri dan Kebijakan Pemerintah, Kebijakan pemerintah terkait pengembangan industri dilakukan guna menumbuhkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk. Pembangunan industri baru memicu perpindahan penduduk desa menuju kota.

J. PENGARUH URBANISASI TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Urbanisasi dan penurunan kemiskinan merupakan dua aspek penting yang berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Urbanisasi merupakan proses pembangunan yang melibatkan berbagai faktor multidimensional baik demografi, sosial, ekonomi, hingga geografis wilayah dan fenomenanya ditandai dengan kejadian pemusatan penduduk pada kawasan perkotaan, kemudian diikuti dengan modernisasi aspek-aspek kehidupan lainnya sebagai akibat dari pengkotaan (Liu et al., 2014). Umumnya, fenomena urbanisasi terjadi lebih intensif di negara-negara berkembang salah satunya seperti Indonesia (Chauvin et al., 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik (1997, 2007, 2015), Indonesia terus mengalami peningkatan proporsi penduduk perkotaan dari 30,9% di tahun 1990 menuju 43,1% di tahun 2005 serta meningkat tajam menjadi 53,12% di tahun 2015. UN Habitat (2016) menyatakan bahwa di Indonesia, 65% penambahan penduduk perkotaan lebih disebabkan oleh migrasi dan reklasifikasi sedangkan sekitar 35% disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan.

Brühlhart & Sbergami (2009) mengamati bahwa urbanisasi berhubungan positif dengan pendapatan per kapita. Penelitian Brühlhart & Sbergami (2009) mempertimbangkan variabel lainnya seperti jumlah lapangan kerja di sektor industri. Turok & Mc Granahan (2013) melibatkan variabel pertumbuhan ekonomi untuk melihat hubungan urbanisasi dan kemiskinan pada negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Hasilnya, penduduk negara-negara dengan tingkat perekonomian rendah hingga menengah tidak terlalu merasakan manfaat penurunan kemiskinan dari urbanisasi. Ramachandran (2014) menyatakan bahwa urbanisasi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Meskipun begitu, menurut Ramachandran (2014) tidak ada hubungan linear yang sederhana antara urbanisasi dan kemiskinan. Terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan seperti besar populasi perkotaan, pengaruh industrialisasi, hingga aspek kebijakan. Dampak urbanisasi berbeda di berbagai negara dan sebagian besar tergantung pada tahap perkembangan ekonomi masing-masing negara (Chauvin et al., 2017). Dengan demikian hasil yang diperoleh mungkin tidak relevan untuk semua negara sampel yang digunakan. Di sisi lain perbedaan teknik analisis dapat menyebabkan hasil yang berbeda pula. Arah hubungan antara urbanisasi (persentase penduduk perkotaan) dan kemiskinan (pendapatan perkapita) pada akhirnya tetap ambigu, terutama pada kasus negara berkembang dengan fenomena urbanisasi yang intensif dan kompleks. Dampak jangka panjang dari urbanisasi yaitu terjadinya

brain draining dan under ruralization ketika jumlah penduduk perdesaan terlalu kecil untuk memaksimalkan proses produksi.

Fenomena brain draining dan under ruralization akan menghambat pertumbuhan kota-kota kecil dan menengah di Indonesia sehingga banyak daerah yang mengalami ketertinggalan pembangunan. Meski begitu dampak negatif urbanisasi di perkotaan umumnya lebih mengancam kehidupan penduduknya dibandingkan dengan apa yang terjadi di perdesaan. Pengaruh positif urbanisasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita secara agregat wilayah di Indonesia selama periode tahun 2000-2018. Hal ini sejalan dengan studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh Fosu (2017), Hassan & Pitoyo (2017), Solarin (2017), Chen et al. (2019), dan Jayanthakumaran et al. (2020). Namun ketika ditinjau pada level kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Indonesia, pengaruh penurunan kemiskinan oleh urbanisasi cenderung lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa proses urbanisasi dinegara berkembang seperti Indonesia merupakan gambaran proses demografi dibandingkan proses ekonomi. Hasil penelitian ini mampu memperjelas studi-studi terdahulu yang telah dilakukan oleh Adams & Page (2005), Acosta et al. (2007), dan Youssef et al. (2016), bahwa urbanisasi mendorong terjadinya ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan. Secara tidak langsung, penduduk migran yang berpindah dari perdesaan ke perkotaan telah menurunkan jumlah penduduk miskin perdesaan melalui remitansi dan peningkatan kualitas hidup. Sebaliknya, perkotaan justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang berasal dari perdesaan. Penelitian ini memberikan pandangan bahwa kajian terkait urbanisasi dan kemiskinan seharusnya tidak lagi hanya dipahami sebagai fenomena perkotaan dan bersifat satu dimensi. Banyak variabel antara yang sebenarnya berperan besar dalam menghubungkan urbanisasi dan kemiskinan seperti variabel perpindahan penduduk dan remitansi. Pengembangan kajian tentang pengaruh urbanisasi terhadap kemiskinan di masa depan, dapat lebih mempertimbangkan sifat "multidimensional" yang dimiliki kedua fenomena tersebut. Terdapat beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam upaya optimalisasi potensi urbanisasi dan perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya "No Poverty". Pertama, perbedaan tingkat urbanisasi di Indonesia disebabkan adanya ketimpangan pembangunan yang dibentuk oleh kebijakan-kebijakan bias kota. Oleh sebab itu, pemerintah harus berfokus pada kebijakan-kebijakan yang mengutamakan integrasi perdesaan dan perkotaan. Kedua, pemerataan fasilitas pelayanan dasar menjadi penting agar perpindahan penduduk bukan lagi disebabkan kurangnya fasilitas pelayanan di perdesaan melainkan karena peluang untuk berkembang yang ditawarkan perkotaan. Ketiga, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui investasi sarana-prasarana transportasi untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia (World Bank, 2019). Keempat, menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Kelima, kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi banyak faktor. Upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin belum tentu mampu

menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

K. TREND URBANISASI DI INDONESIA

Secara umum urbanisasi biasanya didefinisikan sebagai perpindahan penduduk desa ke kota. Di dalam teori migrasi klasik, perpindahan ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor pendorong (*push factor*) dari daerah asal dan faktor penarik (*pull factor*) dari daerah tujuan. Perpindahan ini dikarenakan nilai kefaedahan dari dua wilayah yang berbeda. Dalam perkembangan selanjutnya definisi urbanisasi mengalami perubahan yang lebih luas, tidak saja berbicara tentang perpindahan secara fisik, tetapi urbanisasi merupakan konsep multidimensional (Poungsomlee & Ross, 1992 dalam Keban, 1995) bahwa urbanisasi harus dipahami dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan demografis, proses ekonomi-politik, modernisasi dan legal administrasi. *Pendekatan demografis* diartikan sebagai peningkatan konsentrasi penduduk pada daerah perkotaan, sehingga proporsi penduduk perkotaan secara keseluruhan mengalami peningkatan. Dari sisi *pendekatan ekonomi politik*, urbanisasi dapat didefinisikan sebagai transformasi ekonomi dan sosial yang timbul sebagai akibat dari pengembangan dan ekspansi kapitalisme. Definisi ini sering dipandang sebagai akar dari permasalahan urbanisasi karena kapitalisme internasional dituduh sebagai pemicunya. Dalam proses modernisasi, urbanisasi dipandang sebagai perubahan dari orientasi tradisional ke orientasi modern dimana terjadi difusi modal, teknologi, nilai-nilai, pengelolaan kelembagaan dan orientasi politik dari dunia modern ke masyarakat yang lebih tradisional. Tidak hanya proses difusi, tetapi juga proses intensifikasi pada beragam etnis, suku, agama dan mata pencaharian.

Pada dasarnya urbanisasi menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif. Keban, (1995) mencoba menjelaskan pandangan Arthur Lewis dan Myrdal tentang dampak yang bertolak belakang tersebut. Menurut Lewis, sektor modern yang terdapat di daerah perkotaan jauh lebih produktif dari pada sektor tradisional yang biasanya terdapat di pedesaan. Untuk kepentingan makro, dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional, Lewis menyarankan agar tenaga kerja yang kurang produktif/tidak produktif di daerah pedesaan harus pindah ke kota dan bekerja pada sektor modern. Secara agregat, semua tenaga kerja ini akan menyumbang terhadap total pendapatan nasional. Sebaliknya, Myrdal kemudian mencoba memberikan pemahaman tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh urbanisasi bahwa daerah pedesaan (daerah belakang) akan kehilangan tenaga kerja, dengan demikian sektor pertanian akan terhambat, karena kesulitan mencari tenaga kerja di pedesaan. Kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas pertanian semakin menurun. Dampak yang lebih luas, juga akan mempengaruhi industri yang berkembang di kota yang membutuhkan produk pertanian pedesaan. Jika pengaruhnya besar bagi industri, maka pertumbuhan GNP akan menurun. Kedua pendapat ini penting, karena dengan demikian urbanisasi harus dikendalikan. Jika tidak, urbanisasi

akan mendatangkan masalah besar yang menghambat jalannya proses pembangunan. Masalah klasik yang dihadapi berkaitan dengan urbanisasi selalu pada “urbanisasi tidak terkendali”. Ini terjadi sebagai akibat dari praktek sistem ekonomi yang terlalu mementingkan *modernisasi* industri di kota dan terlalu mengutamakan sektor modern di kota. Akibatnya tidak mampu menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk kota maupun penduduk desa. Arus urbanisasi yang pesat juga merupakan kelemahan masyarakat yang tidak mampu menciptakan pasaran dalam negeri yang memadai untuk mendorong produksi (baik pertanian maupun industri). Bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kebijakan pembangunan yang mengabaikan sektor pertanian telah menimbulkan tidak memadainya pertumbuhan pendapatan di daerah pedesaan.

Tren perkembangan penduduk daerah perkotaan di Indonesia menurut provinsi juga telah diproyeksikan oleh BPS (Tabel 1), dengan membuat asumsi untuk ketiga faktor, yaitu faktor pertumbuhan alami penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa pedesaan menjadi desa perkotaan, tetapi berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*Urban Rural Growth Difference/URGD*). Tingkat urbanisasi menurut provinsi dari tahun 2000 hingga 2025 yang dihitung oleh BPS mencapai 68 persen pada tahun 2025 untuk beberapa provinsi, terutama di Jawa dan Bali. Untuk Sumatera; Riau 71,1 persen, di Jawa; Jakarta 100 persen, Jawa Barat 81,4 persen, Jawa Tengah 73,8 persen, DIY 82,8, Jawa Timur 73,7, Banten 81,5, Bali 81,5 persen, dan Kalimantan Timur 75,9 persen. Bahkan persentase penduduk perkotaan pada 4 provinsi di Jawa pada tahun 2025 lebih dari 80 persen. Keadaan ini memperkuat asumsi umum bahwa tingginya persentase ini disebabkan karena pusat-pusat pertumbuhan (sosial dan ekonomi) terkonsentrasi di perkotaan menjadi faktor penarik yang dominan bagi pergerakan penduduk ke perkotaan. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa pengembangan pusat-pusat ekonomi baru pada kota menengah dan kecil belum memperlihatkan hasil yang maksimal.

Urbanisasi menjadi fenomena yang kuat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Baiquni, 2004) Kota besar dan pusat-pusat industri menjadi tujuan kaum muda untuk mencari pekerjaan. Fenomena ini berkaitan dengan daya tarik pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lapangan pekerjaan yang terbuka dengan dibangunnya industri dan jasa di perkotaan. Faktor daya tarik kota lainnya adalah tersedianya sarana pendidikan yang lebih tinggi, kehidupan modern yang menyenangkan dan beragamnya fasilitas hiburan. Kehidupan kota menimbulkan mimpi tentang kemajuan dan kesejahteraan bagi kalangan muda untuk mengadu nasib. Faktor daya dorong urbanisasi berkaitan dengan involusi pertanian di pedesaan Jawa dan perubahan pada sektor pertanian akibat modernisasi. Lapangan kerja di pedesaan mulai menyempit dan pekerjaan ini tidak lagi menarik bagi kaum muda. Seperti telah dijelaskan pada awal tulisan ini bahwa persoalan urbanisasi tidak hanya menjadi persoalan demografis tetapi lebih luas daripada itu. *Capital brain* dan *brain drain* adalah

sebuah fenomena yang harus diwaspadai. Jika hal ini dibiarkan maka desa akan mengalami pengurasan sumber daya.

L. PROBLEMATIKA URBANISASI

Penomena urbanisasi adalah penomena serius bagi perkotaan maupun pedesaan. Betapa tidak, kota yang dibanjiri oleh kaum urban akan mengalami lonjakan penduduk yang tak terkendali, sementara desa yang ditinggal pergi penduduknya akan mengalami kelangkaan penduduk dan tenaga kerja produktif. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Hal inilah antara lain yang mendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi dengan tujuan bisa mendapat kehidupan yang layak. Selain itu, daya tarik daerah tujuan juga menentukan masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Para urban yang tidak memiliki skill kecuali bertani akan kesulitan mencari pekerjaan di daerah perkotaan, karena lapangan pekerjaan di kota membutuhkan skill yang sesuai dengan bidangnya. Ditambah lagi, lapangan pekerjaan yang juga semakin sedikit sehingga akan terjadi persaingan ketat dalam mencari pekerjaan. Kaum urban yang tidak memiliki skill hanya bisa bekerja sebagai buruh kasar, pembantu rumah tangga, tukang kebun/taman, dan pekerjaan lainnya yang lebih mengandalkan otot ketimbang otak. Sedangkan para pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan, umumnya hanya menjadi tunawisma, tunakarya, dan tunasusila. Seabrek masalah ini tentunya akan memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan kota sehingga menambah permasalahan yang ada di kota. Daerah yang menjadi tujuan kaum urban melakukan urbanisasi biasanya adalah kota besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan sudah maju dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat menentukan daerah tujuan tidak semata berasal dari pemikiran dan niatan dari diri mereka sendiri, tetapi umumnya berasal dari pengaruh luar yang kuat. Pengaruh tersebut biasanya berupa ajakan yang datang dari orang-orang sekitar yang telah lebih dahulu melakukan urbanisasi, informasi-inforamsi yang ada di media massa tentang daerah tujuan, impian pribadi, terdesak kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Masyarakat yang melakukan urbanisasi memiliki beberapa alasan dilihat dari faktor pendorong dan penarik. Faktor-faktor tersebut bisa mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi hal tersebut hanya bisa terlaksana bila para urban memiliki skill yang dibutuhkan di daerah tujuan. Sebaliknya, jika masyarakat tersebut hijrah ke kota tanpa dibekali skill yang memadai dapat menimbulkan masalah bagi kota tujuan, yang paling merasakan dampak dari urbanisasi adalah lingkungan kota tersebut.

KESIMPULAN

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal

(daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja baru bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.

Urbanisasi yang terjadi di Indonesia dipicu karena berbagai faktor baik berupa faktor pendorong yang meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik yang meliputi fasilitas kota memadai dan standar hidup yang tinggi. Baik faktor pendorong maupun faktor penarik urbanisasi, keduanya terkait faktor yang dipicu oleh proses alami, migrasi, kondisi ekonomi, fasilitas sosial-ekonomi, infrastruktur, aksesibilitas, industri dan kebijakan pemerintah. Peningkatan mutu dan kualitas pada berbagai aspek tersebut dapat memicu terjadinya urbanisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Felecia P. "Trend urbanisasi di Indonesia." *Piramida* 6.1 (2010): 1-15.
- ADAM, Felecia P. Tren urbanisasi di indonesia. *Piramida*, 2010, 6.1: 1-15.
- WIDIAWATY, Millary Agung. Faktor-faktor Urbanisasi di indonesia. 2019.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwono, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Bakhri, S., Nurbaiti, F., & Yusuf, A. A. (2023). The Most Influential Factors On Stock Prices In The JII Index. *Jurnal Manajemen*, 27(3), 612-631.
- Bisnis Islam UINSU Medan, 2020.
- DEWI, Yusriani Sapti. Arus Urbanisasi Dan Smart City. *Dewi, YS*, 2017, 1.1: 21-27.
- Dharmayanti, D. ., & Aziz, A. . (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In Indonesia . *Migration Letters*, 21(4), 1410-1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086>
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.

- Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- Glasson, John. (1990). Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan oleh Paul Hadijah, Zara, and Mohammad Isnaini Sadali. "Pengaruh urbanisasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 8.3 (2020): 290-306.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Harahap, Fitri Ramdhani. Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia [Impact of Urbanization for City Developments in Indonesia]. No,92781. University Library of Munich, Germany, 2013
- Harahap, Isnaini. "Ekonomi pembangunan: pendekatan transdisipliner." (2019).
- HARIS, Andi. Studi Media dan Perpustakaan Tentang Urbanisasi. *Jupiter*, 2015,
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488.
- HIDAYATI, Inayah. Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah
- HUMAIDA, Nida, et al. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2020, 18.1: 131-154.
- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia/Cidade Inteligente e Turismo Halal durante a Pandemia Covid-19 na Indonésia. Kumuh (Slum Area). *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*,
- Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.
- Mansur, Mansur. "PROBLEMATIKA URBANISASI." *Al-Muinzir* 7.1 (2014): 70-82.
- NABAL, Alfred Rodrigues Januar; DJAJA, Komara. Dampak kepariwisataan terhadap perubahan pola urbanisasi di Indonesia. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 2022, 17.1: 70-84.
- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.
- NASIR, Ilham. *Dampak urbanisasi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat: Studi di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap*. 2021. PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- NOVERINA, Mita. Fenomena urbanisasi dan kebijakan penyediaan perumahan dan

- PANGGABEAN, Jenny Octaria. *Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Urbanisasi Di Kabupaten Maros*. 2021. PhD Thesis. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- permukiman di perkotaan Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 2017, 36.2:
- PRAMONO, Susatyo Adhi. Dampak Perkembangan Kota Terhadap Lingkungan Prayojana, Triana Wahyu, et al. "Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area)." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan 1.2* (2020):60-69.
- PRAYOJANA, Triana Wahyu, et al. Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Sitohang. LPFEUI, Jakarta
- Siwu, Hanly Fendy Djohar. "Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 18.6* (2019). Sosial Masyarakat. *Teodolita (Media Komunikasi Ilmiah di Bidang Teknik)*,
- SUFFINA, Laila; SUHARTO, Rahcma Budi. Faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi. *KINERJA*, 2022, 19.1: 37-44.
- Tambunan, Khairina. Diktat Ekonomi Pembangunan. Diss. Fakultas Ekonomi Dan Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2021, 7.2: 212-221.
- TRIFITA, Amjad; AMALIYAH, Ridha. Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Global and Policy Journal of International Relations*, 2020, 8.02.
- Wadud, A. M. A., & Layaman. (2023). The Impact of Islamic Branding on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as an Intervening Variable. In *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges* (pp. 95-104). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Wahyuningsih, Wahyuningsih. "Millenium Developpment Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial." *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen 11.3* (2018): 390-399.
- Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 21-45.
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110-139.
- Widiawaty, Millary Agung "Faktor-faktor Urbanisasi Di Indonesia." (2019)
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).
- YUSUF, A. A., SANTI, N., & RISMAYA, E. (2021). The Efficiency of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 239-247.